

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hans Kelsen. 1973. *General Theory of Law and State*. New York.
- Herman Schwartz. 2002. *The Struggle For Constitutional Justice in Post Communist Europe*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Isra, Saldi. 2010. *Perkembangan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK.

- Latif, Abdul. 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Mahfud, Subhan. 2008. *Keadilan Hukum dan Kemanusiaan*. Surabaya: Visipress.
- Manan, Bagir. 1995. *Empat Tulisan tentang Hukum*. Bandung: Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjajaran.
- Manan, Bagir. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Unisba.
- Mauro Cappelletti. 1979. *Judicial Review in the Contemporary World*. the Bobbs-Merril Company Inc.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Samsul, Inosentius. 2009. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2003. *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Siahaan, Maruarar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

### **Jurnal**

Aji Utomo, Nurrahman. “*Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang*”. Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 4 Desember 2015.

Asy’ari, Syukri. “*Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*”. Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 4 Desember 2013.

Aziz, Machmud. “*Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*”. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5 Oktober 2010.

Djunaedi, Eddy. “*Judicial Review di Beberapa Negara Suatu Kajian Perbandingan*”. Ulasan Hukum dalam Varia Peradilan No. 172, Januari, 2000.

Faqih, Mariyadi. “*Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*”. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010.

Huda, Ni’matul. “*Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia*”. Jurnal Hukum No. 1 Vol 15 Januari 2008.

- Indrayana dan Zainal Arifin Muchtar, Denny. “*Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*”. Jurnal Mimbar Hukum Volume 19 No. 3 Oktober 2007.
- Jutta Limbach. “*The Concept of the Supremacy of the Constitution*”. The Modern Law Review Vol. 64 No. 1 January 2001.
- Lia Triastuti, Septina. “*Perlindungan Hak Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi: Pembatalan Larangan Pernikahan Pegawai Satu Atap*”. Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No. 4 Oktober 2018.
- Malik. “*Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*”. Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1 April 2009.
- Rizky Wahyudi. “*Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Jurnal Magister Hukum UMA Vol. 11 Desember 2018.
- Seomarsono, Maleha. “*Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 2 April-Juni 2007.
- Siahaan, Maruarar. “*Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*”. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 4 Agustus 2010.
- Suhariyanto, Budi. “*Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung*”. Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 1 Maret 2016.

Syahrizal, Ahmad. *“Problem Implementasi Putusan MK”*. Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1 Maret 2007.

Widayati. *“Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang”*. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 4 No. 1 Januari-April 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

### **Internet**

<https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, Sejarah Pembentukan

Mahkamah Konstitusi, diakses pada tanggal 21 November 2018

[http://parlemen.net/wp-content/uploads/2018/02/Naskah-Akademik-RUU-](http://parlemen.net/wp-content/uploads/2018/02/Naskah-Akademik-RUU-Perubahan-Kedua-UU-MD3-12Feb18-.pdf)

[Perubahan-Kedua-UU-MD3-12Feb18-.pdf](http://parlemen.net/wp-content/uploads/2018/02/Naskah-Akademik-RUU-Perubahan-Kedua-UU-MD3-12Feb18-.pdf), diakses pada 10 April 2019

[https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/17205981/ketua-dpr-hormati-](https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/17205981/ketua-dpr-hormati-putusan-mk-terkait-undang-undang-md3)

[putusan-mk-terkait-undang-undang-md3](https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/17205981/ketua-dpr-hormati-putusan-mk-terkait-undang-undang-md3), diakses pada 10 April 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4089374/mk-cabut-sejumlah-pasal-di-uu-md3-ini-kata-mendagri>, diakses pada 10 April 2019